

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah pada awalnya dibentuk untuk melindungi sistem ketertiban yang ada di masyarakat, sehingga seluruh masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupan dengan tenang dan lancar. Namun dengan semakin berkembangnya zaman fungsi pemerintah tidak hanya sebagai pelindung melainkan sebagai pelayanan masyarakat. Masyarakat sekarang tidak lagi harus melayani pemerintah seperti zaman kerajaan, namun sebaliknya pemerintah yang harus melayani, mengayomi, serta menjaga keamanan dan ketertiban dengan menjunjung tinggi keadilan sesuai dengan tujuan negara.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayanan publik, pemerintah harus berupaya memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Pelayanan yang diberikan sudah seharusnya mengutamakan kepentingan umum bukan individu dengan memberikan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, sederhana, transparan, dan terbuka sehingga akan menghasilkan kinerja yang baik.

Kinerja pemerintah yang baik bukan hanya memaksimalkan pada pelayanan, akan tetapi kinerja yang baik adalah dapat selaras dengan tujuan dan memiliki pengelolaan keuangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan serta transparan. Rendahnya tingkat akuntabilitas

pemerintah daerah disebabkan empat masalah utama, yakni sasaran yang ditetapkan, tidak berorientasi pada hasil, lalu ukuran keberhasilan tidak jelas dan terukur, kemudian kegiatan yang ditetapkan tidak berkaitan dengan sasaran, dan perincian kegiatan tidak sesuai.

Selain mengayomi masyarakat, perangkat pemerintah juga perlu diperhatikan, salah satunya dengan memberikan kompensasi, yang nantinya akan menunjang kinerja perangkat pemerintahan itu sendiri. Menurut Hasibuan (2002:54), kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Dengan adanya pemberian kompensasi karyawan diharapkan akan termotivasi dan bekerja dengan disiplin.

Pemberian kompensasi yang kurang baik dapat menyebabkan gejolak pada karyawan akibat ketidakpuasan, kemudian akan berdampak pada tidak efektifnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Program kompensasi juga penting bagi organisasi, karena hal tersebut mencerminkan upaya organisasi untuk mempertahankan pegawai mempunyai loyalitas dan komitmen yang tinggi pada organisasi (Handoko, 2003:155). Bukan hanya kompensasi saja yang dapat menjadikan kinerja pemerintahan baik, namun ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan, salah satunya yaitu dengan berpartisipasi dalam penganggaran.

Keikutsertaan aparatur pemerintah daerah dalam proses penganggaran untuk peningkatan kinerja telah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang memuat tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilaksanakan oleh tim anggaran pemerintah daerah. Makna partisipasi dalam pemerintah daerah adalah pelibatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun APBD. Keterlibatan perangkat daerah dalam penyusunan anggaran akan menghasilkan komunikasi yang baik sehingga adanya keselarasan tujuan. Akibatnya daya serap anggaran mencapai persentase sesuai yang diharapkan.

Menurut penelitian Kenis (1979), adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggaran. Pada konteks pemerintah daerah kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat pemerintah daerah untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Sasaran anggaran akan membantu perangkat daerah untuk memprioritaskan permasalahan yang menghambat berkembangnya daerah tersebut.

Dalam hal kejelasan anggaran Bojonegoro yang termuat di kabar berita tahun 2018, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro, menjelaskan bahwa anggaran Rp 6,4 miliar untuk pembelian sepuluh mobil dinas forpimda ini telah disepakati tahun 2017 lalu. Masing-masing mobil tersebut dianggarkan Rp 500 juta, sisanya untuk pembelian mobil dinas perangkat daerah. Berdasarkan data Badan

Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 angka kemiskinan kabupaten Bojonegoro mencapai 14,34% atau sekitar 178 ribu jiwa. Kasus tersebut termasuk dalam kurang jelasnya sasaran anggaran khususnya penempatan prioritas yang kurang tepat.

Faktor yang tidak kalah penting pada kinerja organisasi sektor publik adalah budaya organisasi. Menurut Nawawi (2003) dalam Chusway dan Lodge, budaya organisasi adalah suatu kepercayaan dan nilai-nilai yang menjadi falsafah utama yang dipegang teguh oleh anggota organisasi dalam menjalankan atau mengoperasikan kegiatan organisasi.

Organisasi dengan budaya yang kuat akan mempengaruhi perilaku dan efektifitas kinerja karyawan. Setiap karyawan mempunyai karakter serta wataknya masing-masing, dan setiap karakter dapat mempengaruhi karyawan lain sehingga akan menciptakan budaya organisasi. Sebagai akibatnya kinerja karyawan akan berjalan sesuai dengan budaya yang dianutnya. Terciptanya suasana keakraban antar karyawan lain juga akan mempengaruhi kinerja suatu organisasi, yangmana dalam keakraban tersebut terdapat rasa nyaman, sehingga proses pencapaian tujuan pada organisasi sektor publik akan tercapai.

Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja dari organisasi sektor publik, beberapa variabelnya adalah kompensasi, partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan budaya organisasi. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik penting dilakukan karena berguna sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja instansi sektor publik. Menurut

Mardiasmo (2009:97), penilaian kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, yaitu (1) membantu memperbaiki kinerja pemerintah, (2) pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, (3) mewujudkan pertanggungjawaban organisasi publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH KOMPENSASI, PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA APARATUR PERANGKAT DAERAH (Studi kasus pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten Bojonegoro).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja aparatur perangkat daerah kabupaten Bojonegoro?
2. Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparatur perangkat daerah kabupaten Bojonegoro?
3. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparatur perangkat daerah kabupaten Bojonegoro?

4. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja aparatur perangkat daerah kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kinerja aparatur perangkat daerah kabupaten Bojonegoro.
2. Menganalisis pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur perangkat daerah kabupaten Bojonegoro.
3. Menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparatur perangkat daerah kabupaten Bojonegoro.
4. Menganalisis budaya organisasi terhadap kinerja aparatur perangkat daerah kabupaten Bojonegoro.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktik

Bagi pemerintah daerah kabupaten Bojonegoro, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran dari berbagai pihak, khususnya bagi daerah kabupaten Bojonegoro, serta untuk menjadi bahan pertimbangan agar terus memperbaiki kinerja pemerintah daerah

kabupaten Bojonegoro. Sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayan yang lebih baik lagi.

2. Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman serta memberikan informasi bagi civitas akademika dan dapat dijadikan sebagai refrensi dalam pengkajian masalah kinerja SKPD kabupaten Bojonegoro.

E. Sistematika Penulisan

Sebagai arahan dalam memudahkan dalam penelitian ini, maka penulis menyajikan susunan penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang meliputi pengertian kompensasi, partisipasi penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, budaya organisasi dan kinerja aparatur perangkat daerah, penelitian terdahulu, dan kerangka teoritis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, serta metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil pengumpulan data, analisis data, serta pembahasan hasil analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dari penelitian yang telah dibahas, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang dapat diberikan.